

# **ANALISIS RKP DAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN APBN**

No.01/an.PKA/PP/V/2019

## **KESIAPAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA EKONOMI DIGITAL**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

**BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

## Executive Summary

Perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang signifikan, melahirkan suatu era ekonomi baru, yaitu era ekonomi digital. Era ekonomi digital hadir dengan topografi yang landai, inklusif, dan memberikan banyak peluang dibandingkan era-era sebelumnya. Secara luas ekonomi digital dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi secara luas meliputi pemanfaatan *software*, *hardware*, aplikasi, serta telekomunikasi pada setiap aspek perekonomian. Perbedaan karakter dari era ekonomi digital saat ini menyebabkan adanya perbedaan karakteristik dari tenaga kerja yang diperlukan. Sehingga dalam analisis ini akan dikaji lebih lanjut mengenai kesiapan tenaga Indonesia dalam menghadapi era ekonomi digital, serta melakukan identifikasi kebijakan yang perlu pemerintah ambil dalam rangka menyiapkan tenaga kerja dalam menghadapi era ekonomi digital.

Perkembangan era ekonomi digital yang selaras dengan perkembangan teknologi mulai banyak memberikan perubahan dalam sistem perekonomian, termasuk di dalamnya adalah pasar tenaga kerja yang menunjukkan pergeseran struktur lapangan kerja. Transformasi lapangan kerja dinilai memiliki dua sisi mata pisau; artinya, fenomena ini dapat menjadi ancaman dan memberikan peluang secara bersamaan. Peluang-peluang yang dibawa oleh era ekonomi digital mensyaratkan permintaan akan *digital talent*, atau setidaknya *high-skilled* dan *well-prepared workers* untuk dapat *catch up* dengan *growth pace* era ini.

Jumlah angkatan kerja Indonesia setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun peningkatan ini tidak disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia sebagian besar berupa tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan *low-skilled worker*.

Minimnya jumlah tenaga kerja terampil serta tidak meratanya sebaran tenaga kerja Indonesia yang berkualitas menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, khususnya di era ekonomi digital. *Mismatch* tenaga kerja dengan dunia kerja semakin melebar di era ekonomi digital saat ini. Untuk itu perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi hal itu. Langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada angkatan kerja, sehingga angkatan kerja yang ada dapat diserap oleh industri melalui optimalisasi BLK oleh pemerintah Pusat.

Untuk menentukan jenis pelatihan yang akan diberikan kepada angkatan kerja, pemerintah perlu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada industri yang memberikan pendidikan vokasi kepada tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya pendidikan vokasi ini, diharapkan dapat menghasilkan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja oleh industri.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu melakukan reformasi pada sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah perlu menerapkan kurikulum pembelajaran yang berbasis *lifelong learning* dan memperhitungkan *labor demand* di masa depan. Bila terjadi *mismatched* antara jurusan di bangku sekolah dengan kebutuhan industri, maka perlu dilakukan *reskilling* dan *upskilling* dari para pengajar. Pemerintah perlu melibatkan profesional dalam proses pendidikan di Indonesia.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

EMAIL: [puskaji.anggaran@dpr.go.id](mailto:puskaji.anggaran@dpr.go.id)